Jan Feb Mar Apr | Mei | Jun | Jul

Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2013 Hal. : 14

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5

Jaksa Pelajari Temuan F

Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD

MELAWI, TRIBUN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Moch Djumali menga-takan, pihaknya telah meningkatkan status penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di RSUD Melawi. Ini sebagai tindak lanjut atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ada kerugian negara terhadap pembangunan rumah sakit tersebut.

"Beberapa waktu lalu kita sudah menerima laporan dari BPK bahwasannya ada kerugian negara di rumah sakit tersebut. *Nah,* sekarang dari temuan itu penganganan sudah kita tingkatkan menjadi penyelidikan," kata Djumali kepada *Tribun*, Rabu (14/8).

Kendati sudah menyebut akan melakukan penyelidikan, Kajari masih enggan menyebutkan berapa besar kerugian negara terhadap pembangu-nan RSUD tersebut. Pada intinya, kata Djumali, pihaknya akan berusaha maksimal.

"Pak Bupati juga sudah menyatakan dukungannya ke



Nah, sekarang dari temuan itu penganganan sudah kita tingkatkan menjadi penyelidikan.

MOCH DJUMALI

Kajari Sintang

kita. Silakan diungkap sampai tuntas kasus yang kita tangani itu. Tentu saja itu menjadi motivasi tersendiri," kata Djumali.

Kajari juga mengatakan, setelah mendapat limpahan dari BPK, pihaknya akan segera meminta keterangan dari Direktur RSUD Melawi serta mempelajari berkas dari BPK, sehingga bisa diambil langkah-langkah selanjutnya.

Selain kasus RSUD, Kejari Sintang juga sedang menangani sejumlah kasus korupsi lain di Kabupaten Melawi, antara lain kasus korupsi pembangunan Stadion Melawi, korupsi dana PNPM dan pembangunan workshop.

Untuk kasus stadion, tersangkanya sudah ada kan, tinggal tindak lanjutnya. Sementara workshop sudah pelimpahan dari Polres ke Kejaksaan, sedangkan untuk kasus PNPM sudah tahap dua," katanya.

Djumali mengatakan, untuk menangani sejumlah kasus tersebut memang memakan waktu yang cukup panjang, mengingat jumlah personel yang dimiliki sangat terbatas, sementara wilayah hukumnya meliputi dua daerah, yakni Sintang dan Melawi

Belum lagi kalau sidang harus di Pontianak, sementara anggaran untuk satu tahun itu tiga perkara. Makanya yang stadion kemungkinan kita targetkan tahun depan karena terbatasnya anggaran," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur RS-UD Melawi, Tanjung Harapan mengatakan, kedatangannya ke kantor Kejaksaan Negeri Sintang beberapa waktu lalu hanya sebatas wawancara, setelah kejaksaan menerima laporan dari BPK

Bangun Kantor

Kajari mengatakan, untuk membantu tugasnya dalam mengungkap kasus korupsi di Melawi, keberadaan kantor Kejaksaan Negeri di Melawi memang sangat mendesak, dengan bertambahnya jumlah penduduk dan wilayah hukum yang ada. "Apalagi lahan sudah ada.

Jadi tinggal pembangunannya saja, mudah-mudahan 2014 mendatang kejaksaan tersebut sudah jadi. Sehingga penanganan hukum di Melawi bisa lebih maksimal," tandasnya. (ali)